

Politik Identitas Dalam Masyarakat Multikultural (Studi Kasus Politik Sosial di Indonesia)

Aris Munandar¹ Endang Susanti²

¹ Sekolah Pascasarjana, UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, Indonesia

² Sekolah Pascasarjana, UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, Indonesia

Corresponding Author:

Aris Munandar, Sekolah Pascasarjana, UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, Indonesia

Email: arism2365@gmail.com

Abstract

This research aims to analyse the role of identity politics in Indonesia's multicultural society and its impact on social and political dynamics, particularly through social media in political campaigns. In Indonesia, which has high ethnic, religious and cultural diversity, political parties and legislative candidates often utilize identity politics to mobilise support from certain groups. Social media, as a key platform in modern political campaigns, plays an important role in reinforcing or defusing identity-based social polarisation. This research uses a literature study approach to review literature related to identity politics, social conflict, and the impact of social media in strengthening or defusing tensions between groups. The results show that identity politics, while it can strengthen solidarity within certain groups, also has great potential to increase social polarisation to the detriment of social cohesion. Intensive identity-based campaigns on social media often exacerbate tensions between ethnic or religious groups, which risks undermining national political stability. This research also found that while social media can exacerbate social divisions, it also has the potential to ease tensions through inclusive narratives that reinforce pluralism. Overall, this research provides insight into the challenges and opportunities faced in managing identity politics in Indonesia, as well as how social media can be used wisely to maintain political and social stability.

Keywords: Identity Politics, Social Media, Political Campaigns

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis peran politik identitas dalam masyarakat multikultural Indonesia, serta dampaknya terhadap dinamika sosial dan politik, terutama melalui penggunaan media sosial dalam kampanye politik. Di Indonesia, yang memiliki keragaman etnis, agama, dan budaya yang tinggi, politik identitas sering dimanfaatkan oleh partai politik dan calon legislatif untuk memobilisasi dukungan dari kelompok tertentu. Media sosial, sebagai platform utama dalam kampanye politik modern, memainkan peran penting dalam memperkuat atau meredakan polarisasi sosial berbasis identitas. Penelitian ini menggunakan pendekatan studi pustaka untuk mengkaji literatur terkait politik identitas, konflik sosial, serta dampak media sosial dalam memperkuat atau meredakan ketegangan antar kelompok. Hasil penelitian menunjukkan bahwa politik identitas, meskipun dapat memperkuat solidaritas di dalam kelompok tertentu, juga memiliki potensi besar untuk meningkatkan polarisasi sosial yang merugikan kohesi sosial. Kampanye berbasis identitas yang intensif di media sosial sering kali memperburuk ketegangan antar kelompok etnis atau agama, yang berisiko merusak stabilitas politik nasional. Penelitian ini juga menemukan bahwa meskipun media sosial dapat memperburuk perpecahan sosial, ia juga memiliki potensi untuk meredakan ketegangan melalui narasi inklusif yang memperkuat pluralisme. Secara keseluruhan, penelitian ini memberikan wawasan tentang tantangan dan peluang yang dihadapi dalam mengelola politik identitas di Indonesia, serta bagaimana media sosial dapat digunakan secara bijaksana untuk menjaga stabilitas politik dan sosial.

Kata Kunci: Politik Identitas, Media Sosial, Kampanye Politik

PENDAHULUAN

Indonesia, sebagai negara dengan keberagaman etnis, agama, dan budaya yang sangat tinggi, merupakan contoh yang menarik dalam studi politik identitas. (Buchari, 2014) Keberagaman ini menciptakan struktur sosial yang kompleks dan sering kali menjadi sumber dinamika politik yang tidak dapat diabaikan. Identitas sosial yang dibentuk oleh faktor-faktor seperti suku, agama, dan budaya, tidak hanya mempengaruhi interaksi antarindividu, tetapi juga memainkan peran yang signifikan dalam membentuk sikap politik dan pola pemilihan di kalangan masyarakat. Dalam konteks ini, politik identitas menjadi sebuah fenomena yang penting untuk dipahami, karena dapat mengarahkan perubahan dalam sistem politik dan kebijakan sosial negara (Hidir & Malik, 2024).

Fenomena politik identitas semakin relevan di tengah perkembangan teknologi komunikasi, khususnya media sosial, yang memungkinkan penyebaran wacana politik berbasis identitas sosial dengan cepat dan luas (Soenjoto, 2019). Dalam pemilu dan pilkada, misalnya, identitas etnis, agama, dan budaya sering kali dijadikan alat untuk menarik dukungan dari kelompok-kelompok tertentu. Hal ini memunculkan pertanyaan mengenai seberapa jauh politik identitas memengaruhi orientasi politik individu dan kelompok dalam masyarakat Indonesia (Baidawi & Novianti, 2022). Apakah politik identitas lebih menonjol dalam memobilisasi massa dibandingkan dengan isu-isu lainnya, seperti ekonomi atau kebijakan publik.

Selain itu, politik identitas juga sering kali menyebabkan polarisasi sosial yang cukup tajam. Masyarakat yang sebelumnya hidup dalam kerukunan antarberbagai kelompok etnis dan agama, dapat terpecah belah menjadi kubu-kubu yang saling bertentangan. Hal ini terlihat dalam banyak peristiwa politik yang berakar pada identitas sosial, baik dalam pemilu maupun konflik sosial yang melibatkan kelompok tertentu. Dalam beberapa kasus, politik identitas bahkan memperburuk ketegangan antar kelompok, seperti yang terlihat dalam sejumlah kerusuhan etnis dan agama yang terjadi di berbagai daerah di Indonesia. Oleh karena itu, penting untuk meneliti bagaimana politik identitas berperan dalam mengelola keragaman ini (C. Pamungkas dkk., 2020).

Politik identitas juga tidak hanya berkaitan dengan pemilu atau pilihan politik, tetapi juga mencakup kebijakan sosial dan intervensi negara dalam mengelola keberagaman. Misalnya, kebijakan affirmative action yang ditujukan untuk kelompok tertentu, seperti kebijakan mengenai pendidikan atau pemberdayaan ekonomi, sering kali berhadapan dengan tuntutan politik yang berbasis identitas. Kebijakan semacam ini dapat memperkuat atau justru memperburuk kesenjangan sosial, tergantung pada bagaimana identitas sosial tersebut diintegrasikan dalam proses pembuatan kebijakan.

Di sisi lain, globalisasi juga memberikan dampak yang signifikan terhadap dinamika politik identitas. Proses globalisasi yang membawa masuk budaya dan nilai-nilai luar, sering kali menghadapi resistensi dari kelompok-kelompok yang merasa identitas lokalnya terancam. Hal ini menciptakan ketegangan antara identitas nasional dan global, serta memunculkan berbagai gerakan politik yang mengedepankan pemeliharaan budaya dan tradisi lokal sebagai bagian dari perjuangan politik. Dalam konteks ini, politik identitas menjadi medan pertempuran antara berbagai kekuatan sosial yang memiliki kepentingan untuk melestarikan atau mengubah tatanan sosial yang ada (Otom dkk., 2024).

Globalisasi juga mempengaruhi cara kelompok-kelompok tertentu membangun kesadaran politik berdasarkan identitas mereka. Di Indonesia, beberapa kelompok sosial mulai

menilai globalisasi bukan hanya sebagai peluang, tetapi juga sebagai ancaman terhadap keaslian budaya mereka. Misalnya, dalam konteks politik Islam, munculnya arus pemikiran transnasional yang berbasis pada nilai-nilai agama tertentu sering kali dipengaruhi oleh ideologi luar negeri mendorong sejumlah elemen masyarakat untuk mengadaptasi politik identitas dalam kerangka konservatisme sosial (Zaeni & Zainuri, 2023). Fenomena ini mempertegas ketegangan antara kelompok yang ingin mempertahankan budaya lokal dan mereka yang terbuka terhadap perubahan dan pengaruh luar. Oleh karena itu, pertarungan politik identitas menjadi semakin intens, dengan masing-masing kelompok berusaha mengartikulasikan identitas mereka dalam kerangka perjuangan politik yang lebih luas.

Seiring dengan itu, peran negara dalam mengelola politik identitas menjadi semakin kompleks. Negara sebagai aktor utama dalam pengaturan kebijakan sosial dan politik, dihadapkan pada tantangan untuk menyeimbangkan antara mengakomodasi keberagaman identitas dan menjaga kestabilan sosial. Di satu sisi, kebijakan yang terlalu mengutamakan salah satu identitas sosial atau budaya tertentu dapat memicu perpecahan, sedangkan di sisi lain, kebijakan yang tidak sensitif terhadap identitas dapat menimbulkan ketidakpuasan dan konflik (I Putu Sastra Wingarta dkk., 2021). Oleh karena itu, politik identitas tidak hanya menjadi masalah politis dan sosial, tetapi juga menjadi arena perdebatan mengenai peran negara dalam menjaga kesatuan bangsa yang beragam.

Berdasarkan latar belakang tersebut ada beberapa penelitian terdahulu berdasarkan pembahasan mengenai hubungan antara politik identitas, media sosial, dan konflik sosial di Indonesia. Salah satu penelitian yang relevan adalah oleh Firdaus, yang berjudul *Politik Identitas dan Politisasi Agama dalam Konteks Pemilu di Indonesia*. Penelitian ini menganalisis fenomena meningkatnya politik identitas dan politisasi agama dalam pemilu di Indonesia. Yunus, Yasin, dan Rijal menunjukkan bahwa identitas berbasis etnis, agama, dan suku semakin memainkan peran sentral dalam dinamika politik serta pembentukan aliansi politik tertentu. Pengaruh media sosial dan teknologi informasi juga memperkuat politik identitas dalam satu dekade terakhir, yang berkontribusi pada polarisasi sosial dan politik. Studi ini menyoroti tantangan yang muncul akibat politik identitas dan politisasi agama, seperti menurunnya kualitas demokrasi akibat pemilih yang lebih mempertimbangkan afiliasi identitas daripada program dan kualifikasi calon. Penelitian ini menekankan pentingnya pendidikan politik, peningkatan kesadaran publik, serta pembangunan masyarakat yang inklusif dan toleran untuk mengurangi dampak negatif politik identitas dalam pemilu (Yunus dkk., 2023).

Penelitian lain yang juga terkait adalah *“Politik Identitas Lokal dalam Proses Demokrasi Indonesia”* oleh Yus Herman. Penelitian ini membahas kebangkitan politik identitas di tingkat lokal dalam demokrasi Indonesia, yang berkembang seiring dengan politik desentralisasi. Hermansyah menunjukkan bahwa aktor dan elite politik sering memanfaatkan isu identitas sebagai alat untuk memperoleh dan mempertahankan kekuasaan, sering kali dengan dalih keadilan dan kesejahteraan. Studi ini menggunakan metode deskriptif kualitatif dengan mengumpulkan data dari berbagai literatur. Hasil penelitian menunjukkan bahwa demokrasi di Indonesia masih terjebak dalam aspek prosedural dan sentimen identitas etnis, yang mengarah pada praktik diskriminasi dan eksklusivitas bagi kelompok tertentu (Hermansyah, 2022).

Selain itu, penelitian oleh Arsyad yang berjudul *“Religious Identity Politics on Social Media in Jakarta Governorial Election 2017”* Penelitian ini mengkaji bagaimana politik identitas berbasis agama dikonstruksi dalam diskursus media sosial selama Pemilihan Gubernur DKI Jakarta 2017. Arsyad dan Asdar menggunakan analisis wacana kritis Teun A. Van Dijk untuk meneliti bagaimana Facebook dan Twitter menjadi arena pertarungan politik identitas agama, terutama dalam

membangun narasi "Gubernur Muslim untuk Jakarta." Studi ini menemukan bahwa wacana politik identitas agama dalam media sosial diperkuat melalui penyebaran fatwa ulama, hoaks, serta ujaran kebencian terhadap calon tertentu, yang berujung pada polarisasi masyarakat dan meningkatnya ketegangan sosial. Penelitian ini juga mengungkap bahwa media sosial tidak hanya digunakan sebagai alat kampanye politik, tetapi juga sebagai sarana propaganda berbasis identitas yang memainkan peran dalam membangun sentimen mayoritas terhadap kelompok minoritas. Penyebaran narasi berbasis agama di Twitter dan Facebook menciptakan tekanan sosial terhadap pemilih untuk memilih berdasarkan kesamaan identitas keagamaan, alih-alih mempertimbangkan kompetensi kandidat. Studi ini menyoroti pentingnya regulasi dan edukasi digital untuk mencegah eksploitasi politik identitas dalam kontestasi demokrasi (Arsyad & Asdar A.B., 2019).

Dengan latar belakang tersebut, penting untuk melakukan kajian mendalam mengenai politik identitas dalam masyarakat multikultural di Indonesia. Penelitian ini bertujuan untuk menggali bagaimana politik identitas berperan dalam membentuk politik sosial, serta memahami dampaknya terhadap kohesi sosial dan integrasi politik di Indonesia. Mengingat kompleksitas dinamika politik yang melibatkan faktor identitas, kajian ini juga akan memberikan kontribusi dalam memahami pola-pola politik yang muncul sebagai respons terhadap keberagaman sosial yang ada di Indonesia.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan Studi Pustaka (*library research*) sebagai metode utama untuk menggali pemahaman tentang politik identitas dalam masyarakat multikultural di Indonesia (Hamzah, 2020). Metode ini dipilih karena memungkinkan peneliti untuk memperoleh wawasan mendalam mengenai konsep-konsep kunci, teori-teori politik identitas, serta dinamika sosial yang telah dibahas dalam berbagai literatur akademik. Penelitian ini mengandalkan berbagai sumber sekunder, seperti buku, artikel jurnal, laporan penelitian, serta dokumen-dokumen yang relevan dengan topik yang dibahas. Studi pustaka juga memungkinkan peneliti untuk memetakan perdebatan teoretis yang telah berkembang dalam bidang politik identitas, khususnya dalam konteks masyarakat Indonesia yang multikultural.

Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini terdiri dari literatur-literatur yang membahas politik identitas, sosiologi politik, serta teori-teori mengenai keberagaman dan integrasi sosial. Peneliti juga akan memanfaatkan studi-studi terdahulu yang berkaitan dengan implementasi kebijakan sosial berbasis identitas di Indonesia, seperti kebijakan afirmatif, pemilu, serta konflik-konflik sosial yang melibatkan identitas etnis dan agama. Selain itu, referensi mengenai teori globalisasi dan dampaknya terhadap politik identitas juga akan dianalisis untuk memberikan perspektif yang lebih luas terhadap fenomena ini.

Data yang diperoleh melalui studi pustaka akan dianalisis dengan menggunakan pendekatan analisis tematik, di mana peneliti mengidentifikasi pola-pola utama dalam wacana politik identitas yang muncul dalam literatur yang ada. Peneliti akan mengelompokkan berbagai konsep dan pandangan yang berhubungan dengan politik identitas, serta menganalisis bagaimana hal tersebut dikembangkan dalam konteks Indonesia yang memiliki keberagaman etnis, agama, dan budaya. Dalam menganalisis literatur, peneliti juga akan memperhatikan kritik-kritik yang diajukan oleh para ilmuwan sosial terhadap konsep-konsep politik identitas dan implikasinya bagi kebijakan sosial dan politik.

Selain itu, metode studi pustaka ini juga akan digunakan untuk memahami dinamika sosial yang terkait dengan politik identitas melalui kajian terhadap berbagai studi kasus yang

telah diterbitkan sebelumnya. Peneliti akan memfokuskan pada studi-studi yang membahas interaksi antara kebijakan pemerintah, peran media, serta partisipasi politik kelompok berbasis identitas dalam pemilu dan peristiwa politik lainnya. Dengan menganalisis berbagai literatur yang ada, penelitian ini diharapkan dapat memberikan gambaran komprehensif mengenai hubungan antara politik identitas dan dinamika sosial-politik di Indonesia.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Politik Identitas dalam Pemilu: Pengaruh Identitas Sosial terhadap Pilihan Pemilih

Politik identitas dalam konteks pemilu di Indonesia sangat erat kaitannya dengan bagaimana kelompok-kelompok sosial, berdasarkan identitas seperti agama, etnis, dan budaya, memformulasikan pilihan politik mereka. Di Indonesia yang memiliki keberagaman etnis, agama, dan budaya yang sangat kompleks, pilihan politik sering kali dipengaruhi oleh faktor-faktor sosial tersebut. Politik identitas dalam pemilu bukan sekadar pilihan rasional berdasarkan kebijakan, tetapi juga mencerminkan identitas kelompok yang ingin dipertahankan atau diperjuangkan. Hal ini terutama terlihat pada pemilu legislatif dan pilkada, di mana para pemilih tidak hanya mempertimbangkan program politik calon, tetapi juga kesamaan identitas sosial yang mereka miliki (Perdana, 2023).

Di daerah-daerah dengan heterogenitas tinggi, seperti Jakarta, Bali, dan Papua, politik identitas memainkan peran yang sangat besar dalam menentukan hasil pemilu. Jakarta, sebagai ibu kota negara dengan penduduk yang sangat beragam, misalnya, menunjukkan bagaimana pemilih dapat mengidentifikasi dirinya dengan calon yang lebih mewakili agama atau suku tertentu. Pemilih Muslim, misalnya, cenderung lebih memilih calon yang memiliki kedekatan dengan kelompok agama mereka, baik dalam hal pemahaman keagamaan maupun simbol-simbol keagamaan yang mereka kenal. Hal ini terlihat dalam beberapa pemilu di Jakarta, di mana isu agama menjadi salah satu faktor dominan yang mempengaruhi hasil pemilihan, terutama dalam Pilkada DKI Jakarta 2017.

Fenomena serupa juga terjadi di Bali, meskipun dengan konteks yang sedikit berbeda. Sebagai provinsi dengan mayoritas Hindu, politik identitas di Bali sangat dipengaruhi oleh faktor agama dan budaya lokal. Pemilih di Bali cenderung memilih calon yang dianggap lebih mampu mewakili kepentingan budaya dan agama Hindu. Pada Pilgub Bali 2018, misalnya, calon yang memiliki kedekatan dengan masyarakat adat dan agama Hindu mendapatkan dukungan signifikan, karena pemilih merasa lebih terhubung dengan identitas agama dan budaya mereka. Politik identitas di Bali bukan hanya soal agama, tetapi juga tentang menjaga kelestarian budaya lokal yang dirasa terancam oleh modernisasi dan globalisasi (Safitri dkk., 2023).

Di Papua, di mana kelompok etnis dan agama juga sangat beragam, politik identitas sering kali terkait dengan perjuangan hak-hak lokal dan otonomi daerah. Pemilih di Papua lebih cenderung memilih calon yang memiliki pemahaman terhadap isu-isu spesifik yang dihadapi oleh masyarakat Papua, seperti desentralisasi dan perjuangan untuk hak-hak suku-suku asli Papua. Pilihan politik di Papua tidak hanya berdasarkan identitas agama atau suku, tetapi juga terkait dengan masalah sosial dan politik yang lebih mendalam, termasuk isu ketidakadilan dan marginalisasi yang dialami oleh orang Papua dalam konteks nasional (Lefaan, 2021).

Keterlibatan politik identitas dalam pemilu juga dipengaruhi oleh cara-cara calon menggunakan simbol identitas untuk menarik dukungan. Misalnya, dalam kampanye politik,

calon sering kali menggunakan simbol-simbol agama atau etnis untuk memobilisasi pemilih. Di Jakarta, penggunaan simbol-simbol keagamaan oleh calon tertentu telah terbukti efektif dalam menarik dukungan dari kelompok pemilih yang beragama Islam. Pemilih yang merasa identitas agama mereka diwakili oleh calon tertentu akan lebih cenderung memberikan suara, meskipun kebijakan yang diajukan tidak selalu relevan dengan kepentingan mereka secara langsung.

Namun, meskipun politik identitas berperan penting dalam mempengaruhi pilihan pemilih, fenomena ini juga membawa dampak negatif, yaitu polarisasi sosial yang semakin tajam. Pemilihan berdasarkan identitas dapat menciptakan garis pemisah antara kelompok-kelompok sosial, yang berpotensi menumbuhkan ketegangan antarkelompok. Hal ini dapat memperburuk hubungan sosial di masyarakat yang sudah terfragmentasi. Contoh yang mencolok adalah Pilkada Jakarta 2017, di mana polarisasi sosial antara pendukung calon gubernur yang berbeda identitas agama menjadi sangat kuat, bahkan memicu protes besar-besaran dan kerusuhan.

Di sisi lain, politik identitas juga memiliki dampak positif dalam hal pemberdayaan kelompok-kelompok minoritas yang merasa lebih terwakili. Di Papua, misalnya, adanya calon yang datang dari etnis Papua memberikan harapan baru bagi masyarakat Papua untuk lebih diperhatikan dalam kebijakan nasional. Hal ini memperlihatkan bahwa politik identitas dapat memberikan ruang bagi kelompok yang terpinggirkan untuk lebih terlibat dalam proses politik dan pengambilan keputusan. Namun, keberhasilan politik identitas dalam konteks ini sangat bergantung pada sejauh mana kelompok tersebut mampu membangun solidaritas politik yang kuat dan memiliki akses yang memadai dalam sistem politik.

Secara keseluruhan, politik identitas dalam pemilu di Indonesia mencerminkan betapa kuatnya faktor sosial dalam membentuk pilihan politik individu dan kelompok. Meskipun identitas sosial sering kali menjadi instrumen yang digunakan untuk memenangkan dukungan politik, ia juga bisa memperburuk ketegangan sosial. Oleh karena itu, pemahaman yang lebih mendalam mengenai politik identitas sangat penting, agar negara dan masyarakat Indonesia dapat mengelola keberagaman dengan bijaksana dan menghindari polarisasi yang berlebihan dalam proses politik. Politik identitas, meskipun sering kali divisif, tetap menjadi bagian integral dari dinamika politik di Indonesia, yang perlu dikelola dengan cermat demi tercapainya stabilitas sosial dan politik.

Kampanye Politik dan Politik Identitas

Dalam pemilu di Indonesia, kampanye politik sering kali tidak hanya berfokus pada promosi program-program kebijakan atau janji-janji calon, tetapi juga pada penguatan identitas sosial yang dapat menarik dukungan dari kelompok-kelompok tertentu. Partai politik dan calon legislatif, dengan penuh kesadaran, memanfaatkan politik identitas sebagai salah satu strategi utama dalam meraih suara. Mengingat keragaman etnis, agama, dan budaya di Indonesia, politik identitas menjadi alat yang sangat efektif untuk menggali dukungan dari segmen-segmen pemilih yang memiliki kesamaan dalam hal identitas sosial. Strategi ini memungkinkan para calon untuk lebih terhubung dengan pemilih yang merasa bahwa identitas mereka baik itu agama, etnis, atau suku dapat diwakili dalam politik (“Politik Identitas dalam Pemilihan Umum,” 2023).

Salah satu contoh paling mencolok dalam penggunaan politik identitas dalam kampanye adalah penggunaan simbol-simbol agama oleh calon yang berlatar belakang Muslim dalam pemilu di daerah dengan mayoritas pemilih Muslim, seperti Jakarta. Para calon yang

menggunakan simbol agama Islam seperti berbicara dalam bahasa agama, menghadiri acara keagamaan, atau mengenakan pakaian tradisional Islam diharapkan dapat memperkuat ikatan dengan pemilih Muslim (Kemenag, 2019). Simbol-simbol ini tidak hanya menyampaikan pesan politik, tetapi juga menunjukkan kedekatan antara calon dengan kelompok agama tersebut. Dengan begitu, politik identitas berfungsi sebagai sarana untuk membangun rasa kedekatan emosional dan loyalitas dari pemilih yang merasa terwakili oleh nilai-nilai tersebut.

Di samping itu, partai politik dan calon legislatif juga menggunakan kampanye berbasis etnis untuk menarik dukungan. Sebagai contoh, dalam beberapa pemilu daerah, calon yang berasal dari suku atau etnis tertentu sering kali lebih mampu menarik simpati dari pemilih yang memiliki latar belakang suku yang sama. Di Bali, misalnya, calon yang memiliki kedekatan dengan masyarakat Hindu dan menunjukkan komitmennya terhadap budaya Bali cenderung lebih diterima oleh pemilih lokal. Hal ini menunjukkan bahwa politik identitas berbasis etnis dan budaya memainkan peran yang tidak kalah penting dalam strategi kampanye, terutama di daerah-daerah yang memiliki keunikan budaya yang kuat (Herdiansah, 2017).

Selain agama dan etnis, strategi kampanye berbasis kelas sosial juga merupakan bagian dari politik identitas yang sering digunakan dalam kampanye politik di Indonesia. Para calon legislatif sering kali menonjolkan diri mereka sebagai perwakilan dari kelompok yang lebih rendah atau terpinggirkan, misalnya dengan menyoroti latar belakang mereka yang sederhana atau dengan menunjukkan kedekatan dengan komunitas miskin. Pemilu legislatif sering kali melihat calon yang berasal dari kalangan bawah mendapatkan dukungan yang signifikan dari pemilih yang merasa mereka kurang mendapat perhatian dari pemerintah. Dengan menyuarakan isu-isu yang relevan dengan kesejahteraan ekonomi kelompok ini, calon dapat memperkuat identitas mereka sebagai bagian dari kelompok sosial tertentu dan menggalang dukungan dari pemilih dengan latar belakang serupa.

Kampanye politik berbasis identitas ini juga sering kali memanfaatkan media sosial untuk memperluas jangkauan pesan politik mereka. Media sosial memberikan platform yang sangat efektif untuk kampanye berbasis identitas, karena calon dapat langsung berbicara dengan pemilih, terutama dengan segmen-segmen tertentu yang memiliki kesamaan identitas sosial. Di sini, politik identitas diekspresikan melalui postingan, video, dan pesan yang membangkitkan perasaan solidaritas, baik itu berbasis agama, etnis, atau bahkan status sosial. Sebagai contoh, dalam Pilkada DKI Jakarta 2017, penggunaan media sosial menjadi alat yang sangat strategis untuk memobilisasi kelompok-kelompok dengan identitas agama tertentu. Kampanye ini sering kali memanfaatkan pesan-pesan yang mengajak pemilih untuk memilih calon yang dianggap lebih mewakili kelompok agama mereka, bahkan dengan cara menyerang calon lainnya berdasarkan perbedaan identitas (Hutabarat, 2024).

Namun, meskipun politik identitas dapat memperkuat dukungan bagi calon tertentu, strategi ini juga menimbulkan sejumlah risiko. Penggunaan politik identitas dalam kampanye dapat memperburuk polarisasi sosial dan memperlebar jurang pemisah antar kelompok. Seiring dengan meningkatnya penggunaan politik identitas, ada potensi untuk menumbuhkan ketegangan sosial, terutama ketika kampanye berbasis identitas menciptakan narasi "kami vs. mereka". Dalam konteks ini, calon dan partai politik yang terlalu menggantungkan strategi mereka pada politik identitas dapat merusak kohesi sosial di masyarakat, yang pada gilirannya berpotensi menimbulkan konflik sosial yang lebih besar. Oleh karena itu, meskipun politik identitas dapat efektif dalam meraih suara, ia juga membutuhkan pendekatan yang hati-hati agar tidak merusak kedamaian sosial yang rapuh.

Secara keseluruhan, kampanye politik berbasis identitas di Indonesia memperlihatkan bagaimana faktor-faktor sosial, seperti agama, etnis, dan kelas, sangat mempengaruhi cara para calon dan partai politik berinteraksi dengan pemilih. Politik identitas memungkinkan para calon untuk menciptakan koneksi emosional yang kuat dengan kelompok-kelompok tertentu, namun pada saat yang sama, ia juga dapat memperburuk ketegangan antar kelompok dan memperlebar jurang sosial. Oleh karena itu, meskipun efektif, strategi politik identitas perlu dikelola dengan bijaksana agar tidak menimbulkan dampak negatif bagi stabilitas sosial dan politik dalam jangka panjang.

Dinamika Politik Sosial dan Konflik Identitas di Indonesia

Politik identitas di Indonesia, dengan keberagaman etnis, agama, dan budaya yang sangat tinggi, telah menjadi salah satu faktor penting dalam membentuk dinamika politik sosial. Ketika politik identitas semakin kuat, terutama dalam konteks pemilu dan pemilihan kepala daerah, hal itu bisa memperburuk ketegangan antar kelompok yang memiliki perbedaan identitas sosial (Jamilah, 2024). Di Indonesia, banyak konflik sosial yang berakar pada perbedaan identitas, baik itu etnis, agama, maupun budaya. Pemanfaatan politik identitas untuk memobilisasi dukungan sering kali melibatkan penggambaran kelompok lain sebagai musuh atau ancaman, yang memicu ketegangan yang lebih dalam antar kelompok sosial.

Politik identitas sering kali digunakan oleh partai politik atau calon legislatif untuk meraih suara dengan memainkan perasaan kelompok tertentu. Dalam beberapa kasus, ini bisa memperburuk ketegangan yang sudah ada, seperti yang terlihat dalam konflik-konflik etnis dan agama di berbagai daerah. Contohnya, dalam pemilu yang melibatkan isu agama atau etnis, kandidat sering kali memainkan simbol-simbol agama atau etnis tertentu untuk mendapatkan dukungan. Hal ini tidak hanya memperburuk polarisasi sosial tetapi juga bisa memicu ketegangan antar kelompok yang berbeda identitas (Rahman, 2020).

Pada tingkat yang lebih luas, politik identitas dapat menyebabkan fragmatisasi sosial di masyarakat. Ketika politik identitas semakin mendalam, berbagai kelompok di masyarakat merasa lebih terasing satu sama lain. Mereka yang berasal dari kelompok yang berbeda baik dalam hal agama, etnis, maupun budaya mulai melihat satu sama lain, yang mengarah pada penguatan stereotip dan prasangka negatif. Fenomena ini menciptakan apa yang bisa disebut sebagai kesenjangan sosial, di mana saling pengertian antar kelompok semakin berkurang. Jika tidak dikelola dengan baik, ketegangan ini bisa berubah menjadi konflik terbuka, seperti yang terjadi dalam beberapa insiden kerusuhan yang melibatkan perbedaan etnis atau agama di berbagai daerah.

Dampak dari polarisasi sosial yang disebabkan oleh politik identitas dapat merambah ke dalam aspek yang lebih luas dari kehidupan politik nasional. Polarisasi ini berisiko memperburuk hubungan antar elemen-elemen politik, yang pada gilirannya dapat mengarah pada ketidakstabilan politik. Ketika politik identitas mendominasi wacana politik, hal ini dapat mengalihkan perhatian dari isu-isu kebijakan yang lebih substansial, seperti pembangunan ekonomi, reformasi hukum, atau pengelolaan sumber daya alam (Rahmadhani dkk., 2024). Alih-alih membahas solusi untuk masalah-masalah nasional, perdebatan publik menjadi terfokus pada pertarungan antar kelompok yang memperebutkan dominasi identitas mereka dalam politik. Dampak negatifnya adalah terhambatnya proses pengambilan keputusan yang rasional dan berbasis kepentingan umum.

Selain itu, juga dapat memperburuk ketidakpercayaan terhadap sistem politik dan lembaga negara. Ketika politik identitas lebih sering digunakan untuk memecah belah

masyarakat, warga negara merasa bahwa pemerintah atau partai politik tidak lagi mewakili kepentingan mereka secara adil. Ini bisa menyebabkan apatisme politik, di mana warga negara merasa tidak terhubung dengan proses politik dan enggan untuk berpartisipasi dalam pemilu atau kegiatan politik lainnya. Dalam jangka panjang, hal ini dapat mengurangi legitimasi sistem politik, memperlemah institusi demokrasi, dan bahkan menurunkan tingkat partisipasi politik, yang esensial bagi keberlanjutan demokrasi di Indonesia.

Dalam konteks ini, polarisasi sosial yang disebabkan oleh politik identitas berpotensi menurunkan stabilitas politik nasional. Ketika konflik identitas semakin tajam, potensi untuk terjadi kekerasan sosial atau kerusuhan juga semakin besar. Sejarah menunjukkan bahwa ketegangan sosial yang berlarut-larut dapat mengarah pada eskalasi kekerasan, seperti yang terjadi dalam sejumlah konflik etnis dan agama di masa lalu. Oleh karena itu, sangat penting untuk menjaga agar politik identitas tidak menimbulkan dampak destruktif bagi integrasi sosial dan politik di Indonesia. Untuk itu, diperlukan upaya serius dari semua pihak termasuk pemerintah, partai politik, dan masyarakat untuk membangun dialog antar kelompok sosial dan mencegah politisasi identitas yang berpotensi memecah belah.

Namun, meskipun ada risiko terhadap stabilitas, politik identitas juga memiliki sisi positif apabila digunakan dengan cara yang lebih inklusif. Ketika politik identitas digunakan untuk mengangkat suara kelompok-kelompok minoritas atau terpinggirkan, hal ini dapat memperkuat sistem demokrasi dengan memberikan ruang bagi kelompok-kelompok yang selama ini terabaikan untuk berpartisipasi dalam proses politik. Kebijakan afirmatif yang didasarkan pada identitas, seperti pendidikan untuk kelompok etnis tertentu atau pemberdayaan ekonomi berbasis agama, dapat menciptakan rasa keadilan dan kesetaraan bagi seluruh elemen masyarakat (Bakry dkk., 2024). Oleh karena itu, tantangan terbesar dalam politik identitas adalah bagaimana mengelola keberagaman ini dengan bijaksana, agar dampak negatif polarisasi sosial bisa diminimalkan, sementara keberagaman yang ada tetap menjadi sumber kekuatan untuk kemajuan bangsa.

Dapat di simpulkan secara keseluruhan meskipun politik identitas dapat berperan dalam memperburuk konflik sosial dan polarisasi, ia juga bisa menjadi alat untuk mewujudkan keadilan sosial jika dipraktikkan dengan bijaksana. Mengelola politik identitas dengan cara yang lebih inklusif, tanpa memperburuk ketegangan antar kelompok, merupakan langkah penting untuk menjaga stabilitas politik nasional di Indonesia. Tanpa upaya tersebut, politik identitas berisiko menjelma menjadi ancaman terhadap kohesi sosial yang telah dibangun dengan susah payah.

Peran Media dalam Mempromosikan Politik Identitas

Media merujuk pada berbagai saluran komunikasi yang digunakan untuk menyebarkan informasi, ide, dan hiburan kepada publik. Media dapat dibedakan menjadi media massa tradisional, seperti televisi, radio, dan surat kabar, serta media digital, seperti internet dan platform media sosial. Fungsi utama media adalah sebagai alat untuk menyampaikan pesan, membentuk opini publik, serta menciptakan keterhubungan antara individu, kelompok, dan masyarakat (Susanto, 2017). Dengan perkembangan teknologi, media telah berkembang pesat, memungkinkan interaksi yang lebih cepat dan luas antara pengirim pesan dan audiens, serta menciptakan ruang baru dalam berbagai sektor kehidupan, termasuk politik, ekonomi, dan sosial.

Media memiliki peran yang sangat penting dalam membentuk opini publik dan mempengaruhi dinamika politik di Indonesia. Dalam konteks politik identitas, media,

khususnya media sosial, telah menjadi arena utama di mana identitas sosial, seperti agama, etnis, dan kelompok budaya, diekspresikan dan dipromosikan secara massal. Media sosial, yang memungkinkan interaksi langsung antara politikus dan pemilih, telah memberikan ruang bagi kelompok-kelompok tertentu untuk memperkuat atau bahkan memperbesar identitas sosial mereka dalam ranah politik. Dengan kemampuannya untuk menyebarkan informasi dengan cepat dan luas, media sosial berpotensi memperkuat polarisasi sosial, tetapi juga dapat berfungsi sebagai platform untuk mengurangi ketegangan dan membangun kesadaran sosial yang lebih inklusif (Pamungkas dkk., 2024).

Media sosial memiliki dampak yang besar terhadap politik identitas di masyarakat Indonesia. Satu sisi, media sosial memungkinkan individu atau kelompok untuk mengorganisasi diri mereka berdasarkan identitas, seperti ideologi politik, agama, atau etnis. Misalnya, calon seringkali menggunakan media sosial dalam pemilu atau pilkada untuk menyampaikan pesan yang sangat spesifik kepada kelompok pemilih tertentu dengan menunjukkan komitmen mereka terhadap identitas agama atau etnis. Ini terlihat jelas dalam kampanye berbasis agama yang terjadi di platform seperti Facebook, Twitter, dan Instagram. Orang-orang yang merasa terwakili oleh simbol-simbol ini cenderung lebih mudah terpengaruh dan memilih kandidat yang mendukung identitas yang mereka anut (Triantoro, 2019).

Di satu sisi yang mana media sosial juga dapat meredakan ketegangan yang ditimbulkan oleh politik identitas jika digunakan untuk membangun narasi yang lebih inklusif. Kampanye-kampanye yang bertujuan untuk mendorong toleransi, pemahaman antar kelompok, dan penghargaan terhadap keberagaman dapat dipromosikan secara efektif melalui platform ini. Misalnya, kampanye-kampanye yang mengedukasi publik mengenai pentingnya pluralisme dan menghormati perbedaan dapat mengurangi ketegangan sosial yang disebabkan oleh politik identitas yang terpolarisasi. Dengan demikian, media sosial memiliki potensi untuk meredakan polarisasi sosial, asalkan digunakan untuk menyebarkan pesan yang mempromosikan dialog dan pemahaman antar kelompok yang berbeda (Judijanto dkk., 2024).

Namun, media sosial juga sering kali menjadi alat bagi politisi dan kelompok tertentu untuk memperburuk politik identitas. Kampanye politik yang mengandalkan isu-isu sensitif terkait agama atau etnis dapat memperkuat stereotip dan prasangka terhadap kelompok-kelompok tertentu. Media sosial digunakan secara intensif oleh kelompok-kelompok tertentu untuk menyebarkan pesan-pesan yang menekankan perbedaan agama antara calon gubernur. Melalui narasi yang dibangun di media sosial, sebagian pemilih dibuat untuk merasa bahwa pilihan politik mereka harus didasarkan pada kesamaan agama dengan calon tertentu, memperburuk polarisasi yang sudah ada. Penggunaan media sosial untuk membangun narasi semacam ini berisiko memperburuk ketegangan antar kelompok dan meningkatkan potensi konflik sosial.

Salah satu contoh nyata pengaruh media sosial dalam memperkuat politik identitas dapat dilihat pada kampanye politik berbasis agama dalam Pemilu Presiden 2019. Dalam pemilu ini, kedua pasangan calon presiden Joko Widodo dan Prabowo Subianto memanfaatkan media sosial untuk menyampaikan pesan yang sangat terkait dengan identitas agama mereka. Pendukung Prabowo misalnya, lebih banyak menggunakan media sosial untuk menonjolkan identitas Islam konservatif mereka, sedangkan pendukung Jokowi mencoba untuk mengaitkan citra calon presiden mereka dengan pluralisme dan moderasi (Ni'am dkk., 2025). Kampanye berbasis identitas agama ini tidak hanya menyebar melalui akun-akun politik, tetapi juga

melalui grup-grup diskusi yang terbentuk di platform-platform seperti Facebook dan WhatsApp, yang memperkuat segregasi sosial berdasarkan garis identitas.

Penggunaan media sosial dalam politik identitas juga memengaruhi perilaku politik pemilih dalam jangka panjang. Studi menunjukkan bahwa media sosial dapat berdampak lebih emosional pada keputusan pemilih daripada media konvensional. Informasi yang disebarluaskan melalui media sosial sering kali lebih provokatif dan memupuk rasa solidaritas yang kuat di antara anggota kelompok yang serupa. Ini dapat menyebabkan pemilih menjadi semakin terpolarisasi, mengidentifikasi diri mereka dengan calon atau partai yang mereka anggap mewakili identitas mereka, dan mengabaikan rasionalitas kebijakan yang ditawarkan oleh calon atau partai lainnya. Polarisasi ini dapat menyebabkan ketegangan politik yang berkepanjangan dan memperburuk fragmentasi sosial.

Namun demikian, media sosial juga membuka kesempatan untuk menyebarkan narasi yang lebih kritis terhadap politik identitas itu sendiri. Beberapa kelompok masyarakat, termasuk lembaga swadaya masyarakat (LSM) dan individu yang aktif di media sosial, telah menggunakan platform-platform ini untuk menentang kampanye berbasis identitas yang sempit. Kampanye yang menekankan pentingnya kebersamaan, keberagaman, dan rasa saling menghormati telah mendapat tempat di media sosial, meskipun kadang-kadang narasi ini harus bersaing dengan pesan-pesan yang lebih ekstrem dan divisif (Ramadlan & Afala, 2022). Melalui penyebaran informasi yang mendidik dan menciptakan kesadaran mengenai bahaya polarisasi sosial, media sosial juga memiliki potensi untuk memainkan peran penting dalam meredakan dampak negatif politik identitas.

Secara keseluruhan, media sosial memiliki peran ganda dalam politik identitas di Indonesia. Di satu sisi, ia dapat memperkuat politik identitas dengan menghubungkan individu berdasarkan kesamaan agama, etnis, atau ideologi politik, yang sering kali memperburuk polarisasi sosial. Di sisi lain, media sosial juga dapat menjadi alat untuk meredakan ketegangan dan mengedukasi masyarakat tentang pentingnya keberagaman dan toleransi. Kampanye politik berbasis identitas yang efektif harus mampu mengelola peran media sosial dengan bijaksana, untuk memastikan bahwa pesan-pesan yang disampaikan tidak memperburuk perpecahan sosial, melainkan mendorong integrasi sosial yang lebih harmonis. Oleh karena itu, baik politisi maupun pemilih harus sadar akan pengaruh media sosial dalam membentuk opini dan harus berhati-hati dalam mengonsumsi serta menyebarkan informasi yang berkaitan dengan politik identitas.

KESIMPULAN

Penelitian ini menunjukkan bahwa politik identitas memainkan peran yang sangat penting dalam membentuk dinamika sosial dan politik di Indonesia, khususnya dalam konteks pemilu dan pilkada. Dengan keragaman etnis, agama, dan budaya yang tinggi, politik identitas sering kali digunakan oleh partai politik dan calon legislatif untuk memobilisasi dukungan dari kelompok-kelompok tertentu, dengan memperkuat atau menciptakan identitas sosial yang khas. Media sosial, sebagai platform utama dalam kampanye politik kontemporer, memiliki peran ganda: di satu sisi, ia dapat memperburuk polarisasi sosial dengan mempertegas perbedaan identitas antar kelompok, sementara di sisi lain, ia juga memiliki potensi untuk meredakan ketegangan melalui narasi yang inklusif dan membangun pemahaman bersama di antara kelompok yang berbeda.

Penggunaan media sosial dalam kampanye politik berbasis identitas di Indonesia telah memperlihatkan dampak yang signifikan terhadap kohesi sosial, dengan meningkatkan keterhubungan antara individu dalam kelompok yang memiliki identitas serupa. Namun, hal ini juga meningkatkan risiko polarisasi sosial yang dapat mengancam stabilitas politik nasional. Oleh karena itu, sangat penting bagi politisi dan masyarakat untuk lebih bijaksana dalam menggunakan media sosial, mengingat potensi yang ada untuk mempromosikan baik ketegangan maupun perdamaian sosial. Secara keseluruhan, meskipun politik identitas dapat memperburuk perpecahan sosial, dengan pengelolaan yang tepat, ia juga dapat berfungsi sebagai alat untuk memperkuat keberagaman dan integrasi sosial.

Penelitian ini juga menegaskan pentingnya pengelolaan politik identitas yang inklusif dan sensitif terhadap keberagaman dalam rangka menjaga stabilitas sosial dan politik di Indonesia. Ke depan, upaya untuk mengurangi dampak negatif dari polarisasi sosial harus melibatkan pendekatan yang lebih holistik dan kolaboratif antara pemerintah, partai politik, media, dan masyarakat. Dengan demikian, politik identitas tidak hanya dapat menjadi kekuatan yang memperkuat kohesi sosial, tetapi juga menjadi sarana untuk membangun masyarakat Indonesia yang lebih inklusif dan harmonis.

REFERENSI

- Arsyad, R. M., & Asdar A.B., M. (2019). Religious Identity Politics on Social Media in Jakarta Gubernatorial Election 2017. *Asian Social Science*, 15(4), 11. <https://doi.org/10.5539/ass.v15n4p11>
- Baidawi, A., & Novianti, N. (2022). Praktek Etnisitas Dalam Politik Identitas Di Tengah Multikulturalisme Bangsa Indonesia. *Jurnal Sains Sosio Humaniora*, 6(2), Article 2.
- Bakry, K., Milia, J., Santoso, R. Y., Asra, S., Hajuan, M. A., Maiwan, M., Sumardi, S., Retta, L. M., Mursyidin, M., Rahim, E., Raffiudin, R., & Judijanto, L. (2024). *Sistem Politik Indonesia*. PT. Sonpedia Publishing Indonesia.
- Buchari, S. A. (2014). *Kebangkitan Etnis Menuju Politik Identitas*. Yayasan Pustaka Obor Indonesia.
- Hamzah, A. (2020). *Metode penelitian kepustakaan (library research): Kajian filosofis, teoretis, aplikasi, proses, dan hasil penelitian* (Malang). Literasi Nusantara Abadi.
- Herdiansah, A. G. (2017). Politisasi Identitas dalam Kompetisi Pemilu di Indonesia Pasca 2014. *Jurnal Bawaslu*, 3(2).
- Hermansyah, Y. (2022). Politik Identitas Lokal Dalam Proses Demokrasi Indonesia. *Madani Jurnal Politik dan Sosial Kemasyarakatan*, 14(02), 139–158. <https://doi.org/10.52166/madani.v14i02.3236>
- Hidir, A., & Malik, R. (2024). *Teori Sosiologi Modern*. Yayasan Tri Edukasi Ilmiah.
- Hutabarat, J. M. (2024). *Media Sosial Menjadi Strategi Politik Masa Kini*. 2(1), 204–214. <https://doi.org/10.59581/jpat.widyakarya.v2i1.2318>
- I Putu Sastra Wingarta, Berlian Helmy, Dwi Hartono, I Wayan Mertadana, & Reda Wicaksono. (2021). Pengaruh Politik Identitas terhadap Demokrasi di Indonesia. *Jurnal Lemhannas RI*, 9(4), 117–124. <https://doi.org/10.55960/jlri.v9i4.419>

- Jamilah, A. (2024). *Dinamika Politik Identitas Keagamaan di Indonesia: Perspektif Hukum Islam dalam Konteks Kontemporer*. 1(2).
- Judijanto, L., Wandan, H., Ayu, N., Triyantoro, A., & Suroso, S. (2024). Pengaruh Politik Identitas dan Penggunaan Media Sosial terhadap Partisipasi Politik Digital Pemilih Milenial dan Gen Z di Indonesia. *Sanskara Ilmu Sosial Dan Humaniora*, 2(01), Article 01. <https://doi.org/10.58812/sish.v2i01.500>
- Kemenag. (2019). *Simbol-Simbol Agama Marak Dalam Kampanye Parpol*. <https://balitbangdiklat.kemenag.go.id/berita/simbol-simbol-agama-marak-dalam-kampanye-parpol>. <https://balitbangdiklat.kemenag.go.id/berita/simbol-simbol-agama-marak-dalam-kampanye-parpol>
- Lefaan, A. (2021). *Politik Identitas dan Masa Depan Demokrasi di Papua*.
- Ni'am, H., Ismiyatun, I., & Sari, P. (2025). Politik Identitas dalam Pemilihan Presdiden Tahun 2024: Perspektif Komunikasi Politik. *Spektrum*, 22(1), Article 1. <https://doi.org/10.31942/spektrum.v22i1.12405>
- Otom, M., Hakim, A. R., Ansar, & Rasyid, A. F. (2024). *Globalisasi dan Perubahan Sosial Politik*. PT Media Penerbit Indonesia.
- Pamungkas, C., Setya Permana, Y., Indonesian Institute Of Sciences, Satriani, S., Indonesian Institute Of Sciences, Hakam, S., Indonesian Institute Of Sciences, Afriansyah, A., Indonesian Institute Of Sciences, Mundzakkir, A., Indonesian Institute Of Sciences, Yanuarti, S., Indonesian Institute Of Sciences, Usman, U., Indonesian Institute Of Sciences, Rohman, S., Indonesian Institute Of Sciences, Nadzir, I., & Indonesian Institute Of Sciences. (2020). *Intoleransi dan Politik Identitas Kontemporer di Indonesia*. LIPI Press. <https://doi.org/10.14203/press.308>
- Pamungkas, Y. C., Moefad, A. M., & Purnomo, R. (2024). Konstruksi Realitas Sosial di Indonesia dalam Peran Media dan Identitas Budaya di Era Globalisasi. *Metta : Jurnal Ilmu Multidisiplin*, 4(4), Article 4. <https://doi.org/10.37329/metta.v4i4.3737>
- Perdana, A. P. (2023). Dampak Politik Identitas Pada Pemilihan Umum 2024 Mendatang. *Inovasi Pembangunan: Jurnal Kelitbangan*, 11(02), 225–240. <https://doi.org/10.35450/jip.v11i02.400>
- Politik Identitas dalam Pemilihan Umum: Strategi Kampanye Partai Politik di Indonesia. (2023). *Prodi Komunikasi Penyiaran Islam*. <https://kpi.iainpare.ac.id/2023/05/politik-identitas-dalam-pemilihan-umum.html>
- Rahmadhani, A., Tarigan, F. S. B., Gorat, L. M. B., Sinaga, N. N., & Zai, F. P. D. (2024). Politik Identitas dan Polarisasi Dalam Pemilu. *Indonesian Journal of Education and Development Research*, 3(1), 364–369. <https://doi.org/10.57235/ijedr.v3i1.4671>
- Rahman, M. T. (2020). *Agama dan Politik Identitas dalam Kerangka Sosial*. Prodi S2 Studi Agama-Agama UIN Sunan Gunung Djati Bandung.
- Ramadlan, M. F. S., & Afala, L. O. M. (2022). *Politik Media, Media Politik: Pers, Rezim, dan Kemunduran Demokrasi*. Universitas Brawijaya Press.

- Safitri, Y., Efendi Pane, A., & Harahap, E. W. (2023). Analisis Perilaku Politik, Budaya Masyarakat dan Agama di Indonesia. *Journal of Education Research*, 4(3), 1375–1380. <https://doi.org/10.37985/jer.v4i3.392>
- Soenjoto, W. P. P. (2019). Eksploitasi Isu Politik Identitas terhadap Identitas Politik pada Generasi Milineal Indonesia di Era 4.0. *Journal of Islamic Studies and Humanities*, 4(2), Article 2. <https://doi.org/10.21580/jish.42.5223>
- Susanto, E. H. (2017). Media Sosial Sebagai Pendukung Jaringan Komunikasi Politik. *Jurnal APSIKOM*, 3(2).
- Triantoro, D. A. (2019). Praktik Politik Identitas dalam Akun Media Sosial Anies-Sandi. *Jurnal ILMU KOMUNIKASI*, 16(1), Article 1. <https://doi.org/10.24002/jik.v16i1.1495>
- Yunus, F. M., Yasin, T. H., & Rijal, S. (2023). Politik Identitas dan Politisasi Agama dalam Konteks Pemilu di Indonesia. *Jurnal Sosiologi Dialektika Sosial*, 9(2), 121–137. <https://doi.org/DOI.10.29103/jsds.v9i2.12590>
- Zaeni, A., & Zainuri, Z. (2023). Memahami Gerakan Islam Transnasional (Studi Kasus di Indonesia, Brunei, dan Thailand). *Jurnal Pendidikan Islam*, 1(1). <https://doi.org/10.47134/pjpi.v1i1.26>